

Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jambi

by Sudirman Susilawati

Submission date: 29-Aug-2020 12:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 1375874703

File name: analisis_kinerja_keuangan_prov.jambi.pdf (376.93K)

Word count: 3376

Character count: 19674

Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jambi

Sudirman¹, Susilawati²

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari^{1,2}

1

ABSTRACT

The contribution of local revenue (PAD) to regional income during the 2012-2016 period on average was 37.99% per annum and for 2012 the contribution of local revenue to regional income was 37.02%. This is due to the fact that the receipt of original regional income from third party contributions is very large. On average during the period of 2012-2016 the ability of local tax is relatively low if linked to the Gross Regional Domestic Product. While the power of regional retribution if associated with Gross Regional Domestic Product is also still relatively low, but has increased from year to year. This shows that management management in receiving regional retribution has increased. On average during the 2012-2016 period the realization of local tax revenues reached 103.63% per year (very effective) from the target of local tax revenue. In addition, the realization of regional retribution revenue reaches 103.20% per year (very effective) from the target of receiving regional retribution. Whereas the realization of BUMD profit income only reached 131.01% per year (very effective) from the target of BUMD profit income and the realization of other revenue from legitimate PAD only reached 109.36% per annum (very effective). On average, the economic growth rate of Jambi Province is 5.18% per year, it is expected that the increase in local tax revenue elasticity will increase by 8.90% per year. elasticity of the increase in regional retribution receipts is 12.91% per year. The dependency ratio of Jambi Province in the period of 2012-2016 was an average of 31.69 percent per year. Jambi province's regional autonomy ratio in the 2012-2016 period is an average of 12 percent per year with instructive conditions means it is very dependent on the central government

Keywords, locally-generated revenue

PENDAHULUAN

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 sebagai

penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah menyebabkan terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam banyak literatur disebut pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Dengan pembagian kewenangan/fungsi tersebut pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya. Dengan adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dengan diikuti perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan pengelolaan penggunaan

anggaran sesuai dengan prinsip “*money follows function*” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tetapi mengingat desentralisasi di bidang administrasi juga berarti transfer personal (Pegawai Negeri Sipil) yang penggajiannya menjadi tanggung jawab daerah, prinsip “*money follows function*” atau penggunaan anggaran sesuai fungsinya, tidak mungkin berlangsung. Menurut Lewis (2001), hal ini terjadi karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi sumber utama pendapatan daerah pada umumnya sebagian besar akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, sehingga anggaran untuk pembangunan menjadi kecil. ⁷

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. ⁶

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui potensi indeks daya pajak daerah sebagai akibat pertumbuhan ekonomi; 2) Untuk mengetahui potensi indeks daya retribusi daerah sebagai akibat pertumbuhan ekonomi; 3) Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain PAD yang syah; 4) Untuk mengetahui tingkat elastisitas perubahan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari perubahan PDRB. ²⁹

METODE PENELITIAN

Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jambi, dengan harapan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dan

menelola keuangan daerahnya dengan cara yang efektif dan efisien. Sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 3 (tiga) bulan.

Metode Pengumpulan Data

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang ada dan informasi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini, antara lain: Jambi Dalam Angka, Laporan Analisis PAD. ¹⁷

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Sedangkan data sekunder adalah data-data pendukung yang diperoleh dari pihak eksteren atau sumber lainnya yang ada hubungannya dengan pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha, milik daerah, lain-lain PAD yang syah, serta pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pihak atau instansi terkait di Provinsi Jambi. ²³

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Keuangan dan Asset Daerah, dan Badan Pusat Statistik yang ada di Kota Jambi, serta instansi-instansi terkait lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

Metode Analisis

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kualitatif, yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan potensi sumber-sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, dan lain-lain PAD yang syah.
2. Analisis Kuantitatif, digunakan untuk menjelaskan potensi penerimaan jenis-jenis pendapatan asli daerah, yakni sebagai berikut:
 1. Tabel Distribusi Frekuensi
Menjelaskan tentang indeks perubahan dan atau kontribusi variabel penelitian.
 2. Analisis Daya Pajak dan Retribusi Daerah
Daya pajak daerah dan retribusi daerah adalah rasio antara penerimaan pajak atau retribusi dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak/retribusi di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan formula :

$$\text{Daya Pajak/Retribusi} = \left(\frac{\text{penerimaan pajak / retribusi}}{\text{PDRB}} \right) \times 100 \text{ persen}$$

3. Analisis Efektifitas PAD dengan potensi retribusi itu sendiri, atau Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu retribusi dengan formula :

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{\text{penerimaan pajak / retribusi}}{\text{Potensi Pajak / Retribusi}} \right) \times 100 \text{ persen}$$

4. Analisis Elastisitas Pajak dan Retribusi daerah suatu jenis penerimaan jika terjadi perubahan pada jumlah PDRB, yaitu Analisis elastisitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan dengan formula :

$$\text{epdrd} = \left(\frac{\% \text{ penerimaan pajak / retribusi}}{\% \text{ PDRB}} \right) \times 100 \text{ persen}$$

5. Analisis tingkat kemandirian Daerah

$$\text{TKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPT}}$$
 Pemetaan kemampuan keuangan Daerah, menggunakan dua indikator yaitu tingkat kemandirian daerah dan tingkat ketergantungan daerah, yang diklasifikasi sebagai berikut;
6. Peta kemampuan Keuangan Daerah

Uraian	TKtD _i > TKtD	TKtD _i < TKtD
TKD _i > TKD	Wilayah mandiri dengan tingkat Ketergantungan tinggi	Wilayah Mandiri dengan tingkat ketergantungan rendah
TKD _i < TKD	Wilayah belum mandiri dan tingkat ketergantungan tinggi	Wilayah belum Mandiri dan tingkat Ketergantungan rendah.

Keterangan;
 TKD_i = Tingkat kemandirian daerah i
 TKtD_i = Tingkat ketergantungan daerah i
 TKD = rata-rata tingkat kemandirian daerah
 TKtD = rata-rata tingkat ketergantungan daerah

7. Tingkat Ketergantungan Daerah
 Tingkat ketergantungan daerah diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{TKtD} = \frac{\text{PT}}{\text{TPD}}$$
 Keterangan :
 TKtD = Tingkat ketergantungan daerah
 PT = Penerimaan transfer
 TPD = Total penerimaan daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Pajak daerah terhadap APBD

Tabel 1. Rasio Pajak Daerah terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016

Tahun	Pajak Daerah	APBD	%
2012	808.258.511.161,00	2.663.565.369.283,42	30,00
2013	841.884.751.200,00	2.876.129.174.140,25	29,00
2014	1.010.560.585.180,50	3.165.055.792.535,44	31,00
2015	1.010.318.979.969,00	3.200.129.406.914,79	31,00
2016	966.519.347.102,57	3.391.011.808.116,95	28,00
	Rata-rata		29,80

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2017

Rasio Retribusi Daerah Terhadap APBD

Tabel 2. Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016

Tahun	Retribusi Daerah	APBD	%
2012	13.402.905.831,00	2.663.565.369.283,42	0,50
2013	15.363.758.638,00	2.876.129.174.140,25	0,53
2014	14.587.180.553,00	3.165.055.792.535,44	0,46
2015	19.300.781.734,00	3.200.129.406.914,79	0,60
2016	19.321.610.356,80	3.391.011.808.116,95	0,57
	Rata-rata		0,53

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2017

Rasio PAD terhadap APBD

Tabel 3. Rasio PAD terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016

Tahun	Pajak Daerah	APBD	%
2012	986.128.843.066,28	2.663.565.369.283,42	37,02
2013	1.060.640.978.633,25	2.876.129.174.140,25	36,88
2014	1.281.239.472.808,44	3.165.055.792.535,44	40,88
2015	1.242.809.864.499,97	3.200.129.406.914,79	38,84
2016	1.232.784.078.662,95	3.391.011.808.116,95	36,35
	Rata-rata		37,99

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2017

Tingkat Ketergantungan Daerah Provinsi Jambi

Tabel 4. Rasio tingkat Ketergantungan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016

Tahun	Dana Transfer	TPD	%	Keterangan
2012	764.625.562,00	2.663.565.369.282,4	28,70	Ketergantungan Fiskal /Kinerja Keuangan cukup Baik
2013	887.613.852,00	2.876.129.174.140,3	30,86	Ketergantungan Fiskal /Kinerja Keuangan cukup Baik
2014	997.693.222,00	3.165.055.792.535,4	31,52	Ketergantungan Fiskal /Kinerja Keuangan cukup Baik
2015	1.067.110.634,00	3.200.129.406.914,8	33,35	Ketergantungan Fiskal /Kinerja Keuangan cukup Baik
2016	1.152.097.330,00	3.391.011.808.117,0	33,98	Ketergantungan Fiskal /Kinerja Keuangan cukup Baik

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2017

Kemandirian Daerah Provinsi Jambi

Tabel 5. Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016

Tahun	PAD	Dana Transfer	%	Keterangan
2012	986.128.843.066,28	764.625.562.000	12,89	Instruktif
2013	1.060.640.978.633,25	887.613.852.000	11,95	Instruktif
2014	1.281.239.472.808,44	997.693.222.000	12,84	Instruktif
2015	1.242.809.864.499,79	1.067.110.634.000	11,64	Instruktif
2016	1.232.784.078.662,29	1.152.097.330.000	10,70	Instruktif
	Rata rata		12,00	Instruktif

Pemetaan Kinerja

Tabel 6. Pemetaan Kinerja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016

16	Keterangan	Kuadran
	PENDAPATAN DAERAH	2
	Pendapatan Asli Daerah	2
	Pajak Daerah	5
	Retribusi Daerah	3
	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan	4
	Lain-lain PAD yang Sah	2
	Dana Perimbangan	2
	Bagi Hasil Pajak	4
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2
	Dana Alokasi Umum	1
	Dana Alokasi Khusus	3
	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1

Sumber: data diolah,2017

Klasifikasi

Tabel 7. Klasifikasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016

2	Kuadran	Kondisi
I		Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> disertai nilai <i>growth</i> yang tinggi.
II		Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi
III		Kondisi ini belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Di sini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV		Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Tabel 8. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016

Uraian	TKDi > TKD	TKDi < TKD
TKDi > TKD	Tahun 2012, 2014 Wilayah mandiri dengan tingkat Ketergantungan tinggi	Tahun 2012, 2013, 2014 Wilayah Mandiri dengan tingkat ketergantungan rendah
TKDi < TKD	Tahun 2013, 2015, 2016 Wilayah belum mandiri Dan tingkat ketergantungan tinggi	Tahun 2015, 2016 Wilayah belum Mandiri dan tingkat Ketergantungan rendah

Sumber: data diolah, 2017

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini beberapa temuan pokok, yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berdasarkan harga konstan selama periode tahun 2012-20116 secara rata-rata 5,18 % per tahun. 15 engan kontribusi terbesar bersumber dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pertambangan penggalian.

2. Pertumbuhan ekonomi 32 utamanya pada sektor jasa, meliputi: perdagangan, hotel, restoran/rumah makan, pengangkutan, komunikasi, listrik, keuangan, persewaan, 30 a keuangan, dan jasa lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 27 i sektor industri dan pertambangan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi.

3. Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah selama periode tahun 2012-2016 secara rata-rata sebesar 37,99 % per tahun dan untuk tahun 2012 kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 37,02 %. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga sangat besar.
4. Secara rata-rata selama periode tahun 2012-2016 kemampuan/daya pajak daerah relatif rendah jika dihubungkan dengan Produk Domestik Regional Bruto. Sedangkan daya retribusi daerah jika dihubungkan dengan Produk Domestik Regional Bruto juga masih relatif rendah, namun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan.
5. Secara rata-rata selama periode tahun 2012-2016 realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 103,63 % per tahun (sangat efektif) dari target penerimaan pajak daerah. Begitu pula realisasi penerimaan retribusi daerah mencapai 103,20 % per tahun (sangat efektif) dari target penerimaan retribusi daerah. Sedangkan realisasi penerimaan laba BUMD hanya mencapai 131,01 % per tahun (sangat efektif) dari target penerimaan laba BUMD dan realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah hanya mencapai 109,36 % per tahun (sangat efektif).
6. Secara rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 5,18 % per tahun, maka diharapkan elastisitas pertambahan penerimaan pajak daerah meningkat 8,90 % per tahun. elastisitas pertambahan penerimaan retribusi daerah sebesar 12,91 % per tahun.
7. Rasio Tingkat ketergantungan daerah provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata sebesar 31,69 persen pertahun
8. Rasio kemandirian daerah provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 12 persen pertahun dengan kondisi instruktif berarti sangat tergantung dengan pemerintah pusat
9. Pemetaan kinerja pemerintah daerah provinsi Jambi, pendapatan daerah berada pada kuadran 2, PAD juga berada pada kuadran 2, pajak daerah pada kuadran 2, retribusi daerah pada kuadran 3, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada kuadran 4, bagi hasil pajak pada kuadran 4, dana alokasi umum kuadran 1, dana alokasi khusus kuadran 3, lain-lain pendapatan yang sah kuadran 1.
10. Peta kemampuan keuangan daerah provinsi Jambi, Tahun 2012, 2014 Wilayah mandiri dengan tingkat ketergantungan tinggi, tahun 2013, 2014 wilayah mandiri dengan tingkat ketergantungan rendah, tahun 2015, 2015 wilayah belum mandiri dan tingkat ketergantungan tinggi
11. Tingkat efektifitas realisasi pendapatan asli daerah provinsi Jambi , secara rata-rata selama periode tahun 2012-2016 mencapai 109,36 % (sangat efektif). Hal ini disebabkan:
12. Kontribusi PAD terhadap APBD provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata pertahun 37,91 persen
13. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 26,81 persen pertahun.
14. Kontribusi Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 25,64 persen tahun
15. Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 21,51 persen pertahun
16. Kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 0,01 persen pertahun
17. Kontribusi Pajak Rokok terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 0,32, persen pertahun
18. Kontribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 0,60 persen pertahun
19. Kontribusi bagian laba bank Jambi terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 1,98 persen pertahun
20. Kontribusi penerimaan jasa giro terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun

- waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 0,25 persen pertahun
21. Kontribusi rekening deposito pada kas daerah terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 1,93 persen pertahun
 22. Kontribusi denda keterlambatan kegiatan terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 0,93 persen pertahun
 23. Kontribusi BLUD RSU Raden M. S. terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 2,59 persen pertahun
 24. Kontribusi BLUD RSJ terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 0,01 persen pertahun
 25. Kontribusi penerimaan UPTD AKFAR dan AAK terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 0,32 persen pertahun
 26. Daya pajak daerah selama kurun waktu 2012 – 2016 rata-rata pertahun sebesar 0,64 persen pertahun
 27. Daya retribusi daerah selama kurun waktu 2012 – 2016 rata-rata pertahun sebesar 0,11 persen pertahun
 28. Rata-rata efektifitas pajak daerah provinsi jambi dalam kurun waktu tahun 2012 – 2016 adalah 103,63 persen sangat efektif
 29. Rata-rata efektifitas retribusi daerah selama kurun waktu 2012 – 2016 sebesar 103,20 sangat efektif.
 30. Perkembangan efektifitas laba BUMD rata-rata 131,01 persen pertahun sangat efektif
 31. Penerimaan lain-lain PAD yang sah rata-rata pertahun selama kurun waktu 2012 – 2016 153,62 per²⁶ sangat efektif.
 32. Elastisitas pajak pada tahun 2013 sebesar 0,03 persen, pada tahun 2014 sebesar 1,74 persen ini menunjukkan perubahan PDRB pekah terhadap perubahan pajak. Namun pada tahun 2015 – 2016 perubahan nilai PDRB tidak pekah terhadap perubahan pajak.
 33. Elastisitas retribusi daerah pada tahun 2013 sebesar 1,13 persen ini menunjukkan kepekaan perubahan nilai PDRB terhadap perubahan nilai pajak, pada tahun 2015 kepekaan PDRB terhadap nilai pajak sebesar 45,50 perse.

25

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1999, *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*, Sinar Grafika, Jakarta.
12. Anonim, 2009, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anonim, 2004, *Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah* 14
- Anonim, 2009, *Undang- undang No 28 tahun 2009 pajak daerah, yang selanjutnya adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa* 19
- Aronson, J.R., and Schwartz, E., 1996. *Management Policies in Local Government Finance.*, The International City Management Association. Washington D.C
11. Badan Pusat Statistik, 2012, *Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2012*, Penerbit: BPS Provinsi Jambi 10
- Badan Pusat Statistik, 2013, *Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2013*, Penerbit: BPS Provinsi Jambi
- Badan Pusat Statistik, 2014, *Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2014*, Penerbit: BPS Provinsi Jambi
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2015*, Penerbit: BPS Provinsi Jambi 11
- Badan Pusat Statistik, 2016, *Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2016*, Penerbit: BPS Provinsi Jambi 24
- Bagian Hukum Setda Provinsi Jambi, *Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Pajak Daerah*, Buku I.
- Bagian Hukum Setda Provinsi Jambi, *Himpunan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah*, Buk²⁴.
- Bagian Hukum Setda Provinsi Jambi, *Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Retribusi Daerah*, Buku II.

Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jambi

ORIGINALITY REPORT

48%

SIMILARITY INDEX

46%

INTERNET SOURCES

24%

PUBLICATIONS

24%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	9%
2	online-journal.unja.ac.id Internet Source	7%
3	koleksipengetahuan.wordpress.com Internet Source	4%
4	www.docstoc.com Internet Source	3%
5	pt.scribd.com Internet Source	3%
6	text-id.123dok.com Internet Source	3%
7	eprints.umm.ac.id Internet Source	3%
8	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	2%
9	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%

10	Hardiani Hardiani, Tona Aurora Lubis. "Analysis of leading sector of Jambi City", Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 2017 Publication	1%
11	jurnal.big.go.id Internet Source	1%
12	journal.feb.unmul.ac.id Internet Source	1%
13	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
14	docplayer.info Internet Source	1%
15	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
16	media.neliti.com Internet Source	1%
17	Submitted to General Sir John Kotelawala Defence University Student Paper	1%
18	issuu.com Internet Source	1%
19	Dubravka Jurlina Alibegović, Sunčana Slijepčević, Josip Šipić. "Chapter 10 The gender gap among local representatives: A potential for	1%

local development?", Springer Science and
Business Media LLC, 2013

Publication

20	e-journal.upstegal.ac.id Internet Source	1%
21	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1%
22	nanangbudianas.blogspot.com Internet Source	<1%
23	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	<1%
24	Hartati Hartati. "PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANGHARI DI DESA SUNGAI DUREN", Al- Risalah, 2018 Publication	<1%
25	viqarchu.wordpress.com Internet Source	<1%
26	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1%
27	repository.unib.ac.id Internet Source	<1%
28	bareskrim.com Internet Source	<1%

29	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
30	journal.stieamkop.ac.id Internet Source	<1%
31	Lusinda Natalya Debora Karo, Lintje Kalangi, Novi Swandari Budiarmo. "ANALISIS UPAYA PAJAK, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BITUNG", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2019 Publication	<1%
32	fr.scribd.com Internet Source	<1%
33	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
34	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1%
35	idoc.pub Internet Source	<1%
36	yusranlapananda.wordpress.com Internet Source	<1%
37	Nizwan Zukhri. "Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat	<1%

Kemandirian, Ketergantungan, dan
Desentralisasi Fiskal", Indonesian Treasury
Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan
Negara dan Kebijakan Publik, 2020

Publication

38

Ade Budi Setiawan, Eneng Surtini. "ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS SUMBER-SUMBER PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR", JURNAL AKUNIDA, 2017

<1%

Publication

39

Herman Karamoy, Agus Tony Poputra. "ANALISIS PANEL ATAS PENGARUH EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI UTARA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2014

<1%

Publication

40

Muhammad Hi. Hasan. "Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan", Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 2012

<1%

Publication

41

Winston - Pontoh. "Goodwill No. 1 Vol. 4 Juni 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN

<1%

AUDITING "GOODWILL", 2013

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off